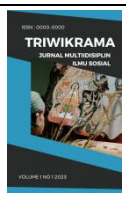
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 7 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



DAMPAK SOSIAL BENCANA ALAM BAGI MASYARAKAT INDONESIA

Sahwa Ramadani[1], Puspa Rani Cancer Muktia[2], Billy Dwi Nugroho[3], Berlando Mahulae[4], Zahratu Sitha Smith[5], Fiona Anggraini[6], Ribka Salonika[7], Khayirah Zahra[8], Akbar Muhammad[9], Daffa Cetta Ugama[10], Salsabila Maulidia[11], Hanifa[12], Ananda Tri Nayla[13], Ardian Fairus Salam[14]
Universitas Riau

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available online November 2026

Email:
sahwaramadani732@gmail.com

Abstrak

Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian material, tetapi juga memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk membahas dampak sosial bencana alam bagi masyarakat Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bencana alam dapat menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat, mengganggu sumber penghidupan dan meningkatkan risiko kemiskinan, serta memengaruhi norma, nilai, dan peran sosial. Di sisi lain, kondisi pascabencana juga dapat mendorong munculnya solidaritas dan memperkuat jaringan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan bencana perlu memperhatikan tidak hanya pemulihan fisik dan ekonomi, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan kesiapsiagaan, pengurangan kerentanan, serta penguatan partisipasi dan solidaritas masyarakat.

Kata kunci: bencana alam; dampak sosial; masyarakat Indonesia; solidaritas; pemulihan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Kondisi geografis, geologis, dan iklim Indonesia menyebabkan berbagai bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan erupsi gunung berapi, dapat terjadi di berbagai wilayah. Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan material, tetapi juga memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat memengaruhi pola hidup, aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dampak bencana alam dapat terlihat dari perubahan pola hidup dan terganggunya sumber penghidupan masyarakat. Kerusakan tempat tinggal, fasilitas umum, dan aset produktif serta terhentinya aktivitas ekonomi menyebabkan masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Putra (2017) menunjukkan bahwa bencana alam dapat mengganggu aset produktif dan sumber pendapatan rumah tangga sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi dan risiko kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan pada saat bencana terjadi, tetapi juga dapat berlanjut selama proses pemulihan.

Selain berdampak pada kondisi ekonomi, bencana alam dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, termasuk norma, nilai, dan peran sosial. Kondisi pascabencana mengharuskan masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan pembagian peran dalam memenuhi kebutuhan bersama. Rosilla dan Tjoetra (2026) menjelaskan bahwa kondisi pascabencana dapat memengaruhi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perubahan

tersebut dapat terlihat dari pola interaksi dan hubungan sosial yang berkembang setelah bencana.

Di sisi lain, kondisi pascabencana juga dapat mendorong munculnya kepedulian, gotong royong, dan solidaritas antarmasyarakat. Hubungan sosial dan kerja sama yang terbentuk dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan mendukung proses pemulihan. Oleh karena itu, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada pemulihan fisik dan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan pemulihan kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan kesiapsiagaan, pengurangan kerentanan, serta penguatan partisipasi dan solidaritas masyarakat.

Pemilihan judul "Dampak Sosial Bencana Alam bagi Masyarakat Indonesia" didasarkan pada pentingnya melihat bencana alam tidak hanya dari sisi kerusakan fisik dan kerugian material, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Bencana dapat mengubah pola kehidupan, hubungan sosial, peran masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Perubahan pola kehidupan dapat terjadi ketika masyarakat kehilangan tempat tinggal, mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, atau harus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan setelah bencana. Dari segi ekonomi, kerusakan tempat usaha, lahan pertanian, dan aset produktif dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian serta meningkatkan risiko kemiskinan. Selain itu, bencana juga dapat memengaruhi hubungan sosial dan peran masyarakat karena adanya perubahan kondisi keluarga dan lingkungan, sehingga masyarakat perlu menyesuaikan diri serta bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kondisi tersebut dapat berlangsung hingga masa pemulihan, bahkan ketika infrastruktur telah diperbaiki, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat belum tentu sepenuhnya pulih.

Namun demikian, di tengah berbagai kesulitan tersebut, kepedulian, gotong royong, dan solidaritas antarmasyarakat dapat menjadi faktor penting dalam membantu proses pemulihan. Oleh karena itu, dampak sosial bencana alam perlu dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak, kerentanan ekonomi, perubahan hubungan sosial, serta dukungan yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan setelah bencana.Pembahasan mengenai dampak sosial ini penting karena pemulihan setelah bencana tidak hanya membutuhkan perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi, tetapi juga membutuhkan kemampuan masyarakat untuk kembali membangun kehidupan sosialnya. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai berbagai dampak sosial yang timbul akibat bencana alam serta pentingnya peran masyarakat dalam menghadapi dan memulihkan kondisi pascabencana. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas dampak sosial bencana alam bagi masyarakat Indonesia, meliputi perubahan pola hidup, terganggunya sumber penghidupan dan meningkatnya risiko kemiskinan, perubahan norma, nilai, dan peran sosial, serta munculnya solidaritas dan penguatan jaringan sosial masyarakat. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya memperhatikan dimensi sosial dalam penanggulangan dan pemulihan bencana di Indonesia.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 7 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Bencana Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat serta dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana dikutip dalam Aditya et al (2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Dampak bencana tidak hanya berupa kerusakan fisik dan material, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Rosilla & Tjoetra, 2026). Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam karena kondisi geografis, geologis, dan iklimnya. Oleh karena itu, bencana alam perlu dipahami tidak hanya sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai kejadian yang dapat menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di kehidupan kita sudah banyak bencana alam yang terjadi dengan jenis jenis yang berbeda.

Bencana alam memiliki beberapa jenis dengan karakteristik dan dampak yang berbeda. 1) Menurut (Supartoyo et al., 2025) Gempa bumi merupakan getaran permukaan bumi akibat aktivitas tektonik yang dapat menimbulkan kerusakan dan memerlukan upaya mitigasi 2) Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut besar yang dapat menggenangi wilayah pesisir akibat gangguan pada massa air laut, misalnya karena gempa bumi bawah laut (Suri et al., 2024). Selain itu, 3) Menurut (Permadi, 2024). Banjir merupakan peristiwa terendamnya suatu wilayah akibat peningkatan volume air yang dapat dipengaruhi oleh curah hujan dan kondisi penggunaan lahan

Dampak Sosial dan Ekonomi Pascabencana

Dampak sosial bencana merupakan perubahan dalam kehidupan masyarakat akibat terganggunya kondisi lingkungan, tempat tinggal, fasilitas umum, dan sumber penghidupan. Dampak tersebut dapat berupa terhentinya kegiatan pendidikan dan pekerjaan, perpindahan ke tempat pengungsian, terganggunya interaksi antarwarga, serta kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Putra, 2017) menjelaskan bahwa kerusakan akibat bencana dapat meningkatkan kerentanan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian, perikanan, perdagangan kecil, atau pekerjaan informal. Oleh karena itu, dampak sosial dalam kajian ini difokuskan pada perubahan aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Bencana juga dapat memengaruhi norma dan nilai sosial Masyarakat. Norma dijelaskan sebagai pedoman atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keteraturan (Yuristyawarman et al., 2023). Sedangkan nilai sosial merupakan sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan bersama. Perubahan keduanya dapat terlihat melalui kegiatan gotong royong, solidaritas, kepedulian terhadap kelompok rentan, serta pembagian bantuan. Rosilla dan Tjoetra (2026) menjelaskan bahwa perubahan sosial pascabencana dapat terlihat melalui pergeseran hubungan sosial dan cara masyarakat menjalankan kehidupan Bersama. Namun, keterbatasan sumber daya juga dapat menimbulkan perbedaan kepentingan.

Selain itu, jaringan sosial berperan penting dalam membantu masyarakat menghadapi dampak bencana. Jaringan sosial merupakan hubungan antara individu, keluarga, tetangga,

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 7 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

organisasi masyarakat, dan pemerintah yang dapat menjadi sumber dukungan.Bencana juga mendorong masyarakat menilai ulang apa yang dianggap penting. Nilai individualis sering bergeser menuju nilai kolektif berupa dukungan seperti gotong royong dan kepedulian terhadap kelompok rentan.Dukungan tersebut dapat berupa penyebaran informasi, penyaluran bantuan, penyediaan tempat tinggal sementara, dan bantuan dalam proses pemulihan. Sebaliknya, terputusnya hubungan sosial akibat perpindahan tempat tinggal atau kerusakan fasilitas komunikasi dapat menyulitkan masyarakat memperoleh informasi dan bantuan (Rosilla dan Tjoetra,2026)

Kerentanan ekonomi merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya untuk menghadapi kerugian dan memulihkan kehidupannya setelah bencana. Kerusakan rumah, lahan pertanian, peralatan kerja, dan tempat usaha dapat menyebabkan penurunan pendapatan serta hilangnya mata pencaharian. Putra (2017) menunjukkan bahwa gangguan terhadap aset produktif dan sumber pendapatan rumah tangga dapat meningkatkan risiko kemiskinan. Kondisi tersebut dapat semakin berat apabila masyarakat tidak memiliki sumber penghasilan alternatif atau tabungan yang memadai, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Adaptasi dan Pemulihan Masyarakat Pascabencana

Adaptasi dan pemulihan masyarakat pascabencana merupakan dua proses yang saling berkaitan dalam menghadapi perubahan kondisi kehidupan akibat bencana alam. Adaptasi mengacu pada proses penyesuaian masyarakat terhadap perubahan rutinitas, pemenuhan kebutuhan dasar, serta hubungan sosial. Sementara itu, pemulihan merupakan upaya untuk mengembalikan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi risiko bencana pada masa mendatang. Menurut Rosilla dan Tjoetra (2026), perubahan pascabencana dapat mencakup pola hidup, norma dan nilai sosial, struktur sosial, distribusi peran, serta jaringan solidaritas dalam masyarakat.

Proses adaptasi masyarakat pascabencana berlangsung melalui penyesuaian aktivitas sehari-hari, strategi pemenuhan kebutuhan dasar, penataan tempat tinggal, serta pengaturan kembali peran dalam keluarga dan komunitas. Kehilangan tempat tinggal, terganggunya mata pencaharian, dan terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar mendorong masyarakat untuk mengembangkan strategi baru dalam mempertahankan keberlangsungan hidup. Penyesuaian tersebut tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga melalui kerja sama antarmasyarakat dan pemanfaatan sumber daya secara bersama. Dengan demikian, adaptasi pascabencana dapat dilihat melalui perubahan pola kehidupan sehari-hari, strategi penghidupan, dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul setelah bencana (Rosilla dan Tjoetra, 2026).

Selain aspek sosial, kondisi ekonomi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi proses adaptasi dan pemulihan masyarakat. Putra (2017) menjelaskan bahwa bencana alam dapat meningkatkan risiko kemiskinan rumah tangga di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kerusakan aset, terganggunya mata pencaharian, serta berkurangnya sumber pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar dan memperlambat proses pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Dalam upaya mendukung pemulihan masyarakat, penguatan aset produktif, peningkatan kesiapsiagaan, serta pembangunan infrastruktur tahan bencana menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Putra (2017) merekomendasikan penguatan aset produktif, latihan kesiapsiagaan, serta peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur tahan bencana untuk mengurangi dampak bencana terhadap kemiskinan. Penguatan aset produktif dapat membantu masyarakat memulihkan kegiatan ekonomi, sedangkan kesiapsiagaan dan infrastruktur yang lebih aman berperan dalam

mengurangi risiko bencana pada masa mendatang. Di samping dukungan ekonomi dan infrastruktur, modal sosial juga memiliki peran penting dalam proses adaptasi dan pemulihan masyarakat pascabencana. Rosilla dan Tjoetra (2026) menjelaskan bahwa kepercayaan, norma kerja sama, dan jaringan sosial dapat membantu masyarakat memperoleh informasi, mengakses bantuan, serta mengorganisasi tindakan kolektif dalam menghadapi dampak bencana.

.

PEMBAHASAN

3.1 Dampak Sosial Bencana Banjir Galodo di Sumatera Barat

Galodo merupakan istilah yang digunakan masyarakat Minangkabau untuk menyebut banjir bandang yang membawa material seperti lumpur, batu, kayu, dan tanah. Di Sumatera Barat, bencana galodo terjadi pada akhir November 2025 setelah hujan lebat menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Salah satu kejadian terjadi pada 26 November 2025 di Kabupaten Agam, kemudian pada 27 November 2025 bencana juga melanda beberapa wilayah lainnya. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan rumah, terganggunya akses jalan, terhentinya aktivitas masyarakat, hilangnya mata pencaharian, serta membuat sebagian warga harus mengungsi.

Dampak sosial akibat galodo dapat dilihat dari perubahan kondisi tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bencana galodo memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kerusakan rumah membuat warga kehilangan tempat tinggal yang aman, sedangkan anak-anak mengalami kesulitan untuk melanjutkan kegiatan belajar seperti biasanya. Selain itu, bencana yang terjadi juga dapat menimbulkan rasa takut dan trauma bagi masyarakat yang mengalaminya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak galodo tidak hanya dirasakan melalui kerusakan fisik, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari dan kondisi mental masyarakat.

Bencana galodo juga berdampak terhadap sumber penghidupan masyarakat. Kerusakan tempat usaha, lahan pertanian, dan peralatan kerja dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat yang kehilangan aset produktif akibat bencana. Hal ini sejalan dengan Putra (2017) yang menjelaskan bahwa bencana alam dapat mengganggu aset produktif dan sumber pendapatan rumah tangga sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi dan risiko kemiskinan.

Selain perubahan kondisi sosial dan ekonomi, masyarakat juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan setelah bencana. Kehilangan tempat tinggal, terganggunya pendidikan, perubahan pekerjaan, serta kondisi kesehatan dapat memengaruhi pola kehidupan dan hubungan sosial masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terdampak perlu melakukan penyesuaian terhadap kondisi baru selama proses pemulihan.

Di sisi lain, kondisi pascabencana juga dapat mendorong munculnya kepedulian dan solidaritas masyarakat. Bantuan dari warga, relawan, dan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak serta mendukung proses pemulihan. Gotong royong dalam membersihkan lingkungan, memberikan bantuan kebutuhan dasar, dan

membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal menjadi bentuk kerja sama sosial yang dapat memperkuat jaringan masyarakat. Oleh karena itu, dampak sosial galodo di Sumatera Barat tidak hanya terlihat dari terganggunya kehidupan masyarakat, tetapi juga dari munculnya kerja sama dan solidaritas dalam menghadapi kondisi pascabencana.

3.2 Banjir di Sumatera Utara dan Faktor yang Memengaruhi Kerawanan Banjir

Banjir di Sumatera Utara merupakan permasalahan lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Salah satu wilayah yang memiliki kerawanan banjir adalah kawasan Medan bagian utara, terutama daerah pesisir yang menghadapi ancaman banjir rob akibat masuknya air laut ketika pasang serta pengaruh luapan sungai. Kondisi tersebut dapat semakin diperparah oleh perubahan penggunaan lahan, perkembangan kawasan permukiman, berkurangnya daerah resapan air, serta kondisi drainase yang kurang mampu menampung limpasan. Penelitian di wilayah Medan Utara menunjukkan bahwa tingkat kerawanan banjir rob berbeda-beda secara spasial; pada tingkat sedang. Oleh karena itu, pengurangan risiko banjir perlu dilakukan melalui pengelolaan tata ruang, peningkatan kapasitas drainase, perlindungan daerah resapan, serta pemetaan kawasan rawan banjir sebagai dasar perencanaan mitigasi (Saputra *et al*., 2020).

Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teoritis, banjir terjadi ketika air menggenangi wilayah yang biasanya kering akibat curah hujan tinggi, luapan sungai, atau buruknya sistem drainase. Kerawanan banjir di provinsi ini dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia yang saling berkaitan. Dari sisi alam, Sumatera Utara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, terutama pada musim penghujan, sehingga volume air yang masuk ke sungai meningkat dalam waktu singkat. Kondisi topografinya juga beragam, mulai dari dataran tinggi di kawasan Pegunungan Bukit Barisan hingga dataran rendah dan wilayah pesisir di sisi timur dan barat. Air hujan dari daerah hulu mengalir deras menuju hilir melalui banyak daerah aliran sungai, dan ketika debit air melebihi daya tampung sungai, wilayah dataran rendah, bantaran sungai, serta kawasan pesisir menjadi mudah tergenang. Kawasan perkotaan yang padat, seperti Medan dan sekitarnya, juga rentan karena banyak permukaan tanah tertutup bangunan dan jalan sehingga air sulit meresap. Dari sisi manusia, alih fungsi lahan di kawasan hulu, seperti penebangan hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan, pertanian, atau permukiman, mengurangi kemampuan tanah menyerap air sehingga air hujan lebih banyak menjadi aliran permukaan yang membawa tanah dan material ke sungai. Material tersebut menyebabkan pendangkalan sungai, sementara kebiasaan membuang sampah sembarangan dan pembangunan permukiman di bantaran sungai semakin mempersempit alur air. Sistem drainase yang kurang terawat atau tidak sebanding dengan pertumbuhan permukiman memperparah genangan, dan rendahnya kesadaran serta kesiapan masyarakat menghadapi bencana membuat tingkat kerawanan semakin tinggi. Dengan demikian, kerawanan banjir tidak muncul dari satu penyebab saja, melainkan dari pertemuan antara kondisi alam yang mendukung terjadinya banjir, kerusakan lingkungan, dan lemahnya pengelolaan wilayah. Jika dikaitkan dengan konsep dampak sosial dan ekonomi dalam kajian teoritis, banjir tidak hanya merusak rumah, jalan, dan fasilitas umum, tetapi juga mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat. Kegiatan pendidikan dan pekerjaan terhenti, sebagian warga harus pindah ke tempat pengungsian, interaksi antarwarga terganggu, dan pemenuhan

kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan kesehatan menjadi sulit. Secara ekonomi, masyarakat yang bergantung pada pertanian, perikanan, perdagangan kecil, atau pekerjaan informal menjadi paling rentan karena lahan, peralatan kerja, dan tempat usaha dapat rusak sehingga pendapatan menurun atau hilang. Kondisi ini bisa semakin berat bagi keluarga yang tidak memiliki tabungan atau sumber penghasilan alternatif, sehingga risiko kemiskinan meningkat. Di sisi lain, banjir juga memengaruhi norma dan nilai sosial, yang tampak dari tumbuhnya gotong royong, solidaritas, dan kepedulian terhadap kelompok rentan, meskipun keterbatasan sumber daya dan pembagian bantuan terkadang memunculkan perbedaan kepentingan. Jaringan sosial yang melibatkan keluarga, tetangga, organisasi masyarakat, dan pemerintah berperan penting dalam menyebarkan informasi, menyalurkan bantuan, dan menyediakan tempat tinggal sementara, sedangkan terputusnya komunikasi dan perpindahan tempat tinggal dapat menyulitkan warga memperoleh bantuan. Karena itu, adaptasi dan pemulihan pascabanjir tidak cukup dengan membangun kembali rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup pemulihan hubungan sosial, penyesuaian pekerjaan, pencarian sumber penghasilan alternatif, dan pemanfaatan dukungan yang tersedia, sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara bertahap serta lebih siap menghadapi banjir di masa mendatang.

3.3 Gempa bumi dan tsunami yang mengguncang Kota Palu dan Donggala pada 28 September

2018 memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara. Kelurahan ini berada di kawasan pinggir pantai sehingga terdampak langsung oleh gelombang tsunami yang tingginya hampir 10 meter dan menjangkau daratan hingga sekitar 378,9 meter. Kerusakan menjadi lebih parah karena pertemuan dua gelombang tsunami yang saling menguatkan. Berdasarkan data kelurahan, bencana tersebut menyebabkan 27 jiwa meninggal dunia, 312 jiwa mengungsi, 357 unit rumah rusak, dan 5 unit infrastruktur wilayah rusak, serta 358 KK kehilangan tempat tinggal (Mira & Budianta, 2025).

Dampak gempa bumi dan tsunami di Kelurahan Mamboro Barat tidak hanya terlihat dari kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga dari kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan pokok setelah kejadian bencana tersebut. Kehilangan rumah, barang-barang, dan cara mencari nafkah bisa membuat keadaan ekonomi keluarga makin buruk dan menghalangi pemulihan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, menurut penulis, pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak, khususnya dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, bantuan untuk kebutuhan pokok, serta dukungan agar bisa memulihkan mata pencaharian mereka. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam proses penyaluran bantuan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, dampak sosial dan ekonomi setelah bencana diharapkan bisa diredam, sehingga masyarakat dapat mulai memenuhi kebutuhan pokoknya secara perlahan.

Pemulihan masyarakat setelah bencana gempa bumi dan tsunami di Palu tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah, sekolah, dan fasilitas umum, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal lagi dan pekerjaan harus diberi waktu, bantuan,

serta kesempatan untuk memulihkan kembali hidupnya. Oleh karena itu, menurut penulis, pemerintah sebaiknya menyediakan program pemulihan jangka panjang, seperti bantuan untuk memperbaiki tempat tinggal, pelatihan keterampilan, serta bantuan dalam membuka kembali usaha-usaha masyarakat. Selain itu, kegiatan gotong royong dan kerja sama antar warga perlu terus ditingkatkan agar masyarakat bisa saling membantu selama proses pemulihan berjalan. Sehingga, keberhasilan pemulihan setelah bencana tidak hanya dilihat dari perbaikan kondisi fisik daerah, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk kembali melakukan kegiatan sehari-hari, memperoleh penghasilan, dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

PENUTUP

1. Simpulan

Beberapa dampak tersebut dapat disimpulkan bahwa dari berbagai kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, sebagai berikut

1. Bencana banjir galodo di Sumatera Barat. Bencana galodo yang terjadi di Kabupaten Agam menyebabkan kerusakan rumah, terganggunya akses masyarakat, terhentinya aktivitas sehari-hari, hilangnya mata pencaharian, serta membuat sebagian masyarakat harus mengungsi. Dampaknya juga dirasakan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 51,3% rumah mengalami kerusakan dan 42,3% anak tidak bersekolah setelah bencana. Selain itu, seluruh responden mengalami trauma akibat bencana tersebut. Kerusakan tempat tinggal, lahan pertanian, tempat usaha, dan peralatan kerja juga membuat masyarakat kesulitan untuk kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, kondisi setelah bencana juga menunjukkan adanya kepedulian dan solidaritas masyarakat melalui kegiatan gotong royong, pemberian bantuan kebutuhan dasar, serta bantuan kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
2. Bencana banjir di Sumatera Utara. Banjir di wilayah Sumatera Utara, khususnya kawasan Medan bagian utara, tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan kondisi wilayah. Banjir rob dapat terjadi akibat masuknya air laut ketika pasang serta luapan sungai. Selain itu, perubahan penggunaan lahan, perkembangan permukiman, berkurangnya daerah resapan air, dan kondisi drainase yang kurang memadai juga dapat meningkatkan risiko banjir. Tingkat kerawanan banjir di wilayah Medan Utara juga berbeda-beda, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi risikonya melalui pengelolaan tata ruang, peningkatan kapasitas drainase, perlindungan daerah resapan, dan pemetaan kawasan rawan banjir. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga perlu dilakukan melalui pencegahan dan mitigasi.
3. Bencana gempa bumi dan tsunami di Palu. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, menunjukkan bahwa kondisi wilayah yang dapat pulih dengan baik belum tentu membuat masyarakat mampu pulih dalam waktu yang sama. Daya pulih wilayah tergolong tinggi, sedangkan daya pulih masyarakat dan rumah tangga tergolong rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai masalah setelah bencana, seperti memburuknya kondisi ekonomi, kehilangan pekerjaan,

kehilangan harta benda, dan kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, pemulihan setelah bencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki kondisi fisik wilayah, tetapi juga perlu memperhatikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dukungan berupa bantuan uang, logistik, dan pemulihan mata pencaharian juga diperlukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupannya.

2. Saran

Setiap daerah memiliki kondisi dan tingkat risiko bencana yang berbeda. Oleh karena itu, upaya mitigasi perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pemberian edukasi mengenai kebencanaan kepada masyarakat agar pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi bencana semakin baik. Masyarakat juga perlu lebih memperhatikan kondisi lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, A., Nasution, D. A., Siregar, D. M., & Aini, N. (2025). Mitigasi dan dampak sosial banjir di Kota Medan: Kajian terpadu terhadap faktor penyebab, respons masyarakat, dan peran pemerintah daerah. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(2), 410–420.

Mira, & Budianta, A. (2025). Daya pulih masyarakat dan wilayah pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami tahun 2018 di Kecamatan Palu Utara. *Jurnal Gawalise,* 4(1), 17–31.

Putra, H. S. (2017). Bencana alam dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi,*7(2).

Rosilla, D., & Tjoetra, A. (2026). Perubahan sosial komunitas pasca bencana alam: Kajian konseptual. *Journal of Social Transformation and Community Development, 1(1)*.

Salfianti, R., & Rahmi, L. (2024). Analisis perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca bencana banjir bandang (Galodo) di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43458–43463.

Saputra, N. A., Tarigan, A. P. M., & Nusa, A. B. (2020). Penggunaan metode AHP dan GIS untuk zonasi daerah rawan banjir rob di wilayah Medan Utara. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 26(1):73–82.